



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 5 Juni 2023
Waktu	: Pukul 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan RKP Tahun 2024
Ketua Rapat	: H. Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, SS., M.Si
Hadir	: 1. 38 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Menteri PP&PA RI (I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si); 3. Para Eselon I Kementerian PP&PA RI beserta Jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 15.10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si., dengan didampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag. Wakil Ketua Komisi Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si., Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, M.P.A., dan H. Marwan Dasopang, M.Si., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda: **“Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan RKP Tahun 2024”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Indikatif Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2024 sebesar Rp273.983.311.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah*), dengan rincian berdasarkan Unit Eselon I sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Rincian Pagu Rancangan Renja Tahun 2024			
		Operasional	Non Operasional		Jumlah (dalam ribuan)
			Prioritas Nasional	Non Prioritas Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)
1	Sekretariat Kementerian	113.331.299	-	24.873.114	138.204.413
2	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	2.350.654	17.362.000	4.148.244	23.860.898
3	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	2.161.942	16.874.000	5.230.500	24.266.442
4	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	2.048.742	6.193.830	5.770.000	14.012.572
5	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	2.194.994	21.515.400	6.530.000	30.240.394
6	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2.943.120	22.215.340	4.260.000	29.418.460
7	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	8.385.123	2.650.000	2.945.009	13.980.132
Jumlah		133.415.874	86.810.570	53.756.867	273.983.311

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai pagu anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tersebut bersama pejabat Eselon I.

2. Komisi VIII DPR RI memahami usulan penambahan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2024 sebesar Rp48.831.010.000,- (*Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan / Tahapan	Kebutuhan Anggaran
1	Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional	24.346.381.000,-
	- Pelaksanaan Survei (Pelatihan Petugas, Pengumpulan Data, Supervisi, dan Rapat Pembahasan)	22.240.281.000,-
	- Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	1.121.300.000,-
	- Diseminasi Hasil	984.800.000,-
2	Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja	24.484.629.000,-
	- Pelaksanaan Survei (Pelatihan Petugas, Pengumpulan Data, Supervisi, dan Rapat Pembahasan)	22.984.398.000,-
	- Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	863.015.000,-
	- Diseminasi Hasil	637.220.000,-
Jumlah		48.831.010.000,-


Pendalaman lebih lanjut mengenai usulan penambahan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2024 tersebut akan dibahas bersama pejabat Eselon I.

3. Komisi VIII DPR RI mendukung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk melakukan pembicaraan kembali dengan Kemenkeu dan Menteri PPN/Bappenas terkait DAK Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak agar bisa direalisasikan tahun anggaran 2025.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan usulan penambahan anggaran KemenPPPA RI tahun 2024 untuk program pendidikan politik bagi perempuan dalam rangka meningkatkan representasi dan kualifikasi politik perempuan di dalam lembaga legislatif.
 - b. Memprioritaskan program sosialisasi dan literasi perlindungan perempuan dan anak untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya dalam upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban serta pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - d. Pemberdayaan terhadap perempuan bagi korban penyintas kekerasan seksual melalui kegiatan ekonomi produktif.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.15 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**



Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si.